

STRATEGI PELAYANAN PELATIHAN KONTRASEPSI PADA PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) PROVINSI JAWA TIMUR

Nor Khofifah

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya
norkhofifah20017@mhs.unesa.ac.id

Meirinawati

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya
meirinawati@unesa.ac.id

Abstrak

Pelayanan kontrasepsi merupakan salah satu upaya dalam program KB (Keluarga Berencana). Program keluarga berencana dirumuskan untuk mengatasi beberapa permasalahan kependudukan di Indonesia diantaranya, masih tingginya angka kematian ibu dan bayi, penurunan penggunaan kontrasepsi, masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kesehatan reproduksi dan kebutuhan ber KB yang belum terlayani dengan baik. BKKBN Provinsi Jawa Timur melalui Renstra (rencana strategis) tahun 2020-2024 menyelenggarakan pelayanan pelatihan kontrasepsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis BKKBN Provinsi Jawa Timur dalam pelayanan pelatihan kontrasepsi bagi bidan. Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Fokus penelitian ini menggunakan teori tahapan strategi program pelatihan menurut Widiastri (2019) yang terdiri dari empat (4) indikator yaitu proses perencanaan program, proses program pelatihan, evaluasi dan monitoring. Hasil penelitian menjelaskan bahwa strategi yang digunakan BKKBN Provinsi Jawa Timur dilihat dari indikator proses perencanaan program sudah dilakukan persiapan dengan matang melalui rapat persiapan, pada indikator proses program pelatihan BKKBN Provinsi Jawa Timur berjalan dengan lancar dan terstruktur, selanjutnya indikator evaluasi terdapat beberapa kendala selama pelatihan kontrasepsi yaitu masih terdapat bidan yang kurang terampil saat praktik pelayanan, *website* yang digunakan kurang optimal dan pada indikator monitoring BKKBN Provinsi Jawa Timur dapat memberikan pandangan terkait pentingnya penggunaan kontrasepsi. Saran yang peneliti berikan dalam penelitian ini adalah 1) BKKBN Provinsi Jawa Timur lebih gencar dalam penyebaran informasi tentang Keluarga Berencana, 2) membuat lembar penilaian secara transparansi dan 3) dapat mengembangkan media belajar yang digunakan selama pelatihan kontrasepsi.

Kata Kunci: Strategi Program, Pelayanan Pelatihan, Pelatihan Kontrasepsi .

Abstract

Contraceptive services are one of the efforts in the family planning program. The family planning program was formulated to overcome several population problems in Indonesia, including the still high maternal and infant mortality rates, decreased use of contraception, low public understanding of reproductive health and the need for family planning which has not been properly served. BKKBN East Java Province through its 2020-2024 Strategic Plan (Renstra) provides contraceptive training services. This research aims to analyze the East Java Province BKKBN in contraceptive training services for midwives. Researchers used descriptive qualitative research methods with data collection methods through observation, interviews, documentation and literature study. The focus of this research uses the theory of training program strategy stages according to Widiastri (2019) which consists of four (4) indicators, namely the program planning process, training program process, evaluation and monitoring. The results research explain that the strategy used by the East Java Province BKKBN, seen from the indicators of the program planning process, has been carefully prepared through preparatory *meetings*, in the indicators the East Java Province BKKBN training program process is running smoothly and structured, then the evaluation indicators are that there are several obstacles during the training contraception, namely that there are still midwives who are less skilled when practicing services, the *website* used is less than optimal and the East Java Province BKKBN monitoring indicators can provide views regarding the importance of contraceptive use. Suggestions researchers can give in this research are 1) BKKBN East Java Province is more aggressive in disseminating information about Family Planning, 2) make assessment sheets transparently and 3) can develop learning media used during contraceptive training.

Keywords: Program Strategy, Training Services, Contraception Training.

PENDAHULUAN

Pemerintah berperan penting dalam menyelenggarakan urusan publik terutama pemberian pelayanan yang baik bagi masyarakat demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia yang sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat, berbunyi “Pemerintah wajib melindungi seluruh rakyat Indonesia, mensejahterakan serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara Indonesia.” Dalam mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia pemerintah mempunyai tiga fungsi diantaranya, berfungsi dalam pelayanan, berfungsi dalam pembangunan, dan berfungsi sebagai pemerintahan umum. Pemerintah berperan aktif untuk meningkatkan dan menghasilkan pelayanan publik yang baik dan berkualitas sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Tophan, 2021). Menurut Devi dan Meirinawati (2022) dalam penelitiannya mendefinisikan pelayanan publik merupakan suatu rangkaian kegiatan organisasi atau pemerinatahan yang memberikan layanan berupa jasa, ataupun non jasa sebagai pemenuhan kebutuhan seluruh masyarakat. Pelayanan publik adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam hal memenuhi segala keperluan pelayanan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk semua warga negara. Dalam pengelompokannya pelayanan publik terbagi menjadi tiga jenis pelayanan menurut Kepmenpan Nomor 63 tahun 2004 yaitu pelayanan administratif, pelayanan barang atau produk serta pelayanan jasa. Berdasarkan ketiga jenis pelayanan tersebut yaitu pelayanan kesehatan termasuk jenis kategori pelayanan jasa. Pelayanan kesehatan tak terlepas dari pentingnya peran tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan yang baik bagi seluruh masyarakat

Pelayanan kesehatan sangat penting terutama bagi kesehatan ibu dan bayi di Indonesia. Kasus kematian ibu dan bayi paling dominan berada di wilayah perdesaan, dengan begitu tenaga kesehatan sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Tenaga kesehatan terutama dokter dan bidan memiliki kewenangan memberikan pelayanan keluarga berpacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 yang menjelaskan bahwa melakukan suatu kegiatan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan telah menyelesaikan studi kesehatan baik didalam atau diluar negeri dan diakui sah serta memenuhi syarat menyelenggarakan praktik pelayanan kesehatan oleh pemerintah pusat. Pada wilayah perdesaan, tenaga kesehatan terutama bidan umumnya membantu masyarakat dalam menangani kelahiran. Bidan juga memiliki kewenangan dalam memberi sebuah penyuluhan atau konseling kesehatan reproduksi bagi perempuan dan keluarga berencana, hal ini didasari pada Permenkes 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang peran bidan dalam sebuah program Keluarga Berencana (KB). Pentingnya program KB dapat membuat kualitas keluarga semakin

meningkat, menyelamatkan status kesehatan ibu, menjarak angka kelahiran bayi, mencegah kehamilan yang tidak diinginkan serta dapat menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan bayi (AKB) di Indonesia (Asi et al., 2023).

Salah satu faktor penyebab keluarga tidak mencapai tingkat kualitas ini disebut sebagai "Empat Terlalu" dan "Tiga Terlambat". Empat Terlalu berarti hamil di usia muda (di bawah 16 tahun), hamil terlalu sering (lebih dari 3 anak), pada usia lanjut yang masih hamil (35 tahun keatas), dan hamil terlalu dekat. bersama-sama (jarak kurang dari 2 tahun). Kejadian kehamilan yang tidak diinginkan terjadi karena keterbatasan pengetahuan perempuan tentang kesehatan reproduksi dan perencanaan kehamilan sehingga hal tersebut mengakibatkan peledakan anak di Indonesia. Berikut merupakan data angka peledakan anak sepuluh (10) Provinsi terbanyak di Indonesia tahun 2023.

Tabel 1. Data Angka Peledakan Anak 10 Provinsi Terbanyak di Indonesia Tahun 2023

No	Provinsi	Jumlah
1	Jawa Barat	3.283.701
2	Jawa Tengah	2.293.930
3	Jawa Timur	2.236.845
4	Banten	849.039
5	Sumatera Utara	828.052
6	Dki Jakarta	706.509
7	Sulawesi Selatan	587.087
8	Lampung	564.535
9	Riau	434.679
10	Aceh	440.404

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Pada tabel 1 dapat diketahui bahwa jumlah anak menurut Provinsi di Indonesia pada tahun 2023 mengalami ledakan di Provinsi Jawa Barat yang menduduki posisi pertama dengan jumlah 3.283.701 anak, lalu posisi kedua di Provinsi Jawa Tengah sebesar 2.293.930 anak dan Provinsi Jawa Timur sebesar 2.236.845 anak. Berdasarkan tingginya frekuensi kehamilan yang tidak diinginkan, di Jawa Timur menempati posisi nomor tiga pada seluruh Provinsi di Indonesia.

Penurunan angka kematian ibu (AKI) di Indonesia berhasil signifikan, dari 305 kematian per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2012-2015 turun menjadi 189 kematian ibu hamil per 100.000 kelahiran hidup di tahun 2020 (Badan Pusat Statistik, 2020). Akan tetapi, hal ini belum mencapai target AKI yaitu sebesar 183 kematian per 100.000 kelahiran hidup sehingga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2019-2024 menjadi prioritas utama untuk Indonesia dalam menekan angka kematian ibu (AKI). Hal ini dapat dibuktikan dengan gambar data jumlah kematian

ibu dengan sepuluh (10) Provinsi terbanyak di Indonesia pada tahun 2021 sebagai berikut.

Tabel 2. Data Angka Kematian Ibu 10 Provinsi Terbanyak di Indonesia Tahun 2021

No	Provinsi	Nilai
1	Jawa Timur	1.279
2	Jawa Barat	1.204
3	Jawa Tengah	976
4	Banten	298
5	Sumatera Utara	248
6	Aceh	208
7	Sulawesi Selatan	195
8	Sumatera Barat	193
9	Lampung	187
10	Kalimantan Barat	183

Sumber: Databoks. Badan Pusat Statistik, 2021

Pada tabel 2 dapat menjelaskan bahwa jumlah kematian ibu menurut Provinsi di Indonesia pada tahun 2021, Jawa Timur menduduki posisi tertinggi yakni sebesar 1.279 jiwa, lalu diikuti oleh Jawa Barat sebesar 1.204 jiwa dan Jawa Tengah sebesar 976 jiwa. Selain itu, hasil long form survei penduduk juga memberikan informasi mengenai angka kematian anak di Indonesia berdasarkan rentang usia mulai dari usia 0-5 tahun sebagai berikut.

Tabel 3. Data Angka Kematian Penduduk Usia Dini di Indonesia Hasil Long Form SP2020

Data Angka Kematian Bayi Hasil Long Form 2020 Rentang 50 tahun Periode 1971-2022		
Keterangan	Usia	Jumlah
IMR (<i>Infant Mortality Rate</i>)	0-11 Bulan	16.85
NMR (<i>Neonatal Mortality Rate</i>)	> 1 tahun	9.3
CMR (<i>Child Mortality Rate</i>)	1-4 tahun	2.98
USMR (<i>Under 5 Mortality Rate</i>)	> 5 tahun	19.83

Sumber: Berita Resmi Statistika (BRS). Badan Pusat Statistik, 2020

Tabel 3 menunjukkan hasil long form sensus penduduk (SP)2020 pada periode 1971-2022 dengan rentang 50 tahun, jumlah angka kematian bayi (AKB) di Indonesia mengalami penurunan hampir 90%. Dari gambar diatas diketahui penurunan AKB (angka kematian bayi) dari 26 kematian per 1000 kelahiran atau *Infant Mortality Rate* (IMR) pada SP2010 turun signifikan menjadi 16,85 kematian per 1000 kelahiran. Lalu pada angka kematian *neonatal* atau *Neonatal Mortality Rate* (NMR) sebesar 9,30 kematian per 1000 kelahiran hidup di Indonesia, artinya terdapat 9-10 bayi yang meninggal sebelum umur 1 tahun. Pada angka kematian anak atau *Child Mortality Rate* (CMR) sebesar 2,98 kematian per 1000 kelahiran hidup, artinya terdapat 3 kematian anak umur 1-4 tahun per 1000 kelahiran hidup. Dan pada angka

kematian balita atau *Under 5 Mortality Rate* (UNMR) sebesar 19,83 kematian per 1000 kelahiran, artinya terdapat 19-20 kematian anak per 1000 kelahiran hidup sebelum usia 5 tahun. Dengan begitu, terindikasi bahwa turunnya angka kematian bayi ada kaitannya dengan pelayanan kesehatan masyarakat serta kehadiran tenaga kesehatan terutama bidan cukup membaik dalam 50 tahun terakhir.

Salah satu instansi pemerintah yang menangani permasalahan kependudukan di Indonesia adalah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Maka dari itu BKKBN memiliki program yang strategis yaitu program Keluarga Berencana (KB). Program keluarga berencana bertujuan dalam menciptakan keluarga yang berkualitas dan menjadi sandaran bagi pembangunan keluarga. Dasar hukum dari program keluarga berencana terutama pada pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KB-KR) berpacu pada Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 pasal 78 tentang kesehatan, menjelaskan bahwa sebuah program pelayanan KB pada pasangan usia subur dalam mengatur jarak kehamilan bertujuan untuk menciptakan generasi selanjutnya yang unggul, cerdas dan sehat. Program keluarga berencana dinilai sebagai program strategis dalam menekan angka kematian ibu. Program Keluarga Berencana (KB) mempunyai visi mewujudkan keluarga berkualitas tahun 2015. Keluarga berencana sebagai upaya dalam mengatur angka kelahiran anak, jarak dan usia yang ideal, menjarak kehamilan, sesuai hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Keluarga berkualitas merupakan keluarga yang sejahtera, harmonis, maju dan memiliki jumlah anak yang ideal (Sundoro et al., 2023).

Pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) sebagai salah satu bagian dari komponen program *safe motherhood* yang merupakan upaya pemerintah dalam menurunkan angka kematian Ibu (Hati, 2023). Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KB-KR) juga menjadi prioritas dalam program Keluarga Berencana (KB) yang meliputi pengadaan alat kontrasepsi, pendistribusian nya, operasional pelayanan pemasangan kontrasepsi serta penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjadi pelaksana tersebut atau disebut dengan pelayanan pelatihan kontrasepsi yang ditujukan bagi bidan (Krass et al., 2023). Program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi merupakan salah satu program dibawah kendali Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). BKKBN mempunyai salah satu kegiatan dalam program keluarga berencana yaitu penyelenggaraan pelayanan pelatihan bagi bidan atau disebut dengan pelatihan kontrasepsi bagi bidan berdasarkan Renstra

BKKBN tahun 2020-2024 dengan tujuan dapat mengatasi berbagai permasalahan kependudukan di Indonesia yaitu:

1. Tingginya angka kematian ibu dan bayi
2. Penurunan penggunaan kontrasepsi modern
3. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kesehatan reproduksi
4. Kebutuhan ber-KB yang belum terlayani

BKKBN Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022 mengadakan pelatihan pelayanan kontrasepsi yang ditujukan untuk bagi bidan dan dilaksanakan setiap tahun sebanyak 80 bidan dengan empat (4) angkatan dan masing-masing angkatan sejumlah 20 bidan. Hal tersebut dilakukan agar bidan yang dilatih dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap dengan sumber daya yang kompeten serta dapat meningkatkan pengetahuan, sikap, serta pembaruan pada metode yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Seperti dilansir dari *website* Kominfo.jatim, Sukanto selaku Kepala bidang Pelatihan dan Pengembangan BKKBN Jawa timur menegaskan bahwa, pelatihan ini di ditujukan bagi dokter dan tenaga kesehatan terutama bidan untuk memberikan pelayanan keluarga yang sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan dalam hal mengembangkan tenaga kesehatan sebagai peningkatan mutu dan karir tenaga kesehatan. Maka dari itu, pelatihan pelayanan kontrasepsi ini dilaksanakan sesuai pedoman pada standar dan mekanisme yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 Pasal 30 ayat (1) sehingga pemberian pelatihan pelayanan kesehatan dapat dipertanggungjawabkan.

Penyelenggaraan pelatihan pelayanan kontrasepsi bagi bidan harus sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Kesehatan, yaitu pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam menjamin sarana prasarana pelayanan alat dan obat dan ketersediaan tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan KB yang bermutu, aman dan diterima dengan baik oleh masyarakat. Pelatihan yang diadakan oleh BKKBN Provinsi Jawa Timur merupakan upaya peningkatan kompetensi sejumlah bidan mengenai teknologi kontrasepsi update khususnya pada metode kontrasepsi jangka Panjang (MKJP) seperti implant dan IUD (Mardiyono et al., 2020). Pada pelatihan pelayanan kontrasepsi harapannya agar bidan yang sudah dilatih dapat menyampaikan hasil pelatihan kepada rekan kerja dan dapat diimplementasikan saat melakukan pelayanan di masing-masing bagiannya.

Pelatihan pelayanan kontrasepsi bertujuan untuk melatih bidan agar terampil dalam melakukan pelayanan KB kepada masyarakat (Pratiwi et al., 2021). Hj Wiwiek Hariyati SST, MM.Kes. selaku Sekretaris Pengurus

Daerah Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Provinsi Jawa Timur sekaligus fasilitator dalam pelatihan pelayanan kontrasepsi mengungkapkan bahwa:

“Kita memang membutuhkan pelatihan mengenai pelayanan kontrasepsi, khususnya pelayanan kontrasepsi, lebih fokus pada konsultasi Alat Pengambil Keputusan Keluarga Berencana (ABPK) dan konsultasi tentang Pemeriksaan Kelayakan Medis Penggunaan Alat Kontrasepsi (Roda KLOP) yang sangat penting perannya dalam kontrasepsi. Keberhasilan kontrasepsi akan bergantung pada pelayanan yang baik. Jika ABPK dan Roda KLOP berhasil, maka pelayanan berikutnya juga berhasil.” (Wawancara pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 10.00 WIB)

Pelayanan kontrasepsi dengan konsep konseling dan ABPK ditujukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai alat kontrasepsi khususnya alat kontrasepsi modern, yaitu meningkatkan pelayanan kontrasepsi, tersedianya alat kontrasepsi yang terjangkau serta kemudahan akses pelayanan KB. Oleh karena itu, BKKBN Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan pelatihan bagi bidan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses, sistem, cara menjaga reproduksi, kegunaan alat kontrasepsi dan pemahaman masyarakat terhadap perencanaan kehidupan berkeluarga semakin meningkat.

Untuk menyelenggarakan pelayanan pelatihan kontrasepsi yang baik dan sesuai dengan harapan, BKKBN Provinsi Jawa Timur membuat strategi yang tepat dalam penyelenggaraannya. Gerry Jhonson dan Kevan Scholes (dalam Aliah, 2016) pengertian strategi adalah sebagai petunjuk jangka panjang suatu organisasi dalam mendapatkan keuntungan melalui sumber daya yang tidak tetap untuk memenuhi harapan segala pihak dan mencapai sebuah tujuan, sehingga dalam membuat sebuah strategi dibutuhkan manajemen yang baik. Manajemen strategi adalah sebuah konsep terencana yang digunakan dalam merumuskan, mengimplementasi, hingga mengevaluasi suatu kegiatan hingga terbentuk keputusan yang optimal (Adhima dan Oktariyanda, 2023). Sedangkan Mulyadi (dalam Hasan et al., 2021) mengartikan manajemen strategi merupakan proses yang dilakukan seorang pemimpin dalam mewujudkan visi atau tujuan suatu organisasi. Selain itu, terdapat tipe strategi dalam merumuskan sebuah manajemen strategi dan menurut Jack Kooten (dalam Mudiono, 2023) ada empat (4) tipe-tipe strategi diantaranya,

1. Strategi Organisasi, strategi ini ada kaitannya dengan perumusan visi misi, tujuan organisasi, inovasi organisasi serta pembatasan yang diperlukan untuk

selanjutnya. strategi yang mencerminkan seluruh arah organisasi yang bertujuan menciptakan pertumbuhan bagi organisasi secara keseluruhan

2. Strategi Program, strategi ini terfokus pada implikasi strategi dari program tertentu dengan mengetahui dampak dari pelaksanaan program dan dampak bagi organisasi serta masyarakat. Strategi program merupakan suatu tindakan atau perencanaan yang dilakukan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama dan mempertimbangkan kelebihan serta kekurangan dalam kegiatan tersebut. Strategi program berkaitan dengan peran organisasi dalam menjalankan sebuah program. Menurut Widiastri (2019) terdapat beberapa tahapan dalam pelaksanaan program dengan 4 (empat) indikator antara lain,
 - a. Proses Perencanaan Program
Strategi ini berkaitan dengan analisis kebutuhan pelatihan dan rancangan program awal sebelum program dilaksanakan meliputi persiapan pelatihan, lokasi dan waktu pelatihan, fasilitator atau pemandu pelatihan, materi pelatihan, peserta pelatihan serta sarana dan prasarana pelatihan.
 - b. Proses Program Pelatihan
Strategi ini terfokus pada implementasi program yang telah direncanakan serta dampak program bagi penyelenggara, bidan serta masyarakat.
 - c. Evaluasi
Strategi ini menilai kemampuan organisasi terhadap pelaksanaan dengan menganalisis situasi dan kondisi sehingga dapat menjadi upaya organisasi berkembang di masa yang akan datang.
 - d. Monitoring
Strategi ini memantau keberhasilan organisasi dalam program yang dilaksanakan sehingga tujuan program tercapai dan sesuai dengan apa yang diharapkan.
 3. Strategi Pendukung Sumber Daya, strategi ini memperhatikan bagaimana dalam pelaksanaannya mengoptimalkan sumber daya yang ada. Strategi ini memanfaatkan sumber daya yang ada di dalam organisasi seperti tenaga kerja, teknologi dan lain sebagainya.
 4. Strategi Kelembagaan, strategi ini menilai atau mengevaluasi kemampuan organisasi terhadap pelaksanaan dengan menganalisis situasi dan kondisi sehingga dapat menjadi upaya organisasi berkembang di masa yang akan datang. Strategi ini berfokus pada ide pengembangan suatu organisasi
- Dari pemaparan terkait strategi dalam penyelenggaraan pelayanan pelatihan, peneliti mengidentifikasi terdapat tahapan dalam strategi program

pelatihan yaitu proses perencanaan program, proses program pelatihan, evaluasi dan monitoring. Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengetahui strategi peningkatan pelayanan yang dilakukan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Timur melalui pelatihan pelayanan kontrasepsi bagi bidan. Dengan demikian, judul pada penelitian ini adalah **“Strategi Pelayanan Pelatihan Kontrasepsi Pada Program Keluarga Berencana di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur”**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis strategi BKKBN dalam meningkatkan penyelenggaraan pelayanan pelatihan kontrasepsi bagi bidan.

METODE

Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2011) penelitian kualitatif merupakan penelitian untuk menemukan, menyelidiki, menjelaskan dan menggambarkan kualitas dari fenomena yang dapat dijelaskan dan tidak dapat diukur. Penelitian bersifat deskriptif yaitu untuk menggambarkan dan mengetahui fakta dari sebuah kejadian yang akan diteliti sehingga memudahkan penulis dalam mendapatkan data secara objektif dan agar memahami strategi pelayanan publik melalui pelatihan pelayanan kontrasepsi bagi bidan di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Timur.

Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, studi literatur, dan dokumentasi. Lokasi penelitian ini berada di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur. Selain itu, peneliti mengambil lokasi pada BKKBN Jawa Timur karena merupakan salah satu instansi pemerintah yang menyelenggarakan pelatihan pelayanan kontrasepsi bagi bidan.

Adapun fokus penelitian ini adalah strategi program pelayanan pelatihan, yang dianalisis menggunakan teori strategi program pelatihan oleh Widiastri (2019) dengan empat indikator yaitu proses perencanaan program, proses program pelatihan, evaluasi dan monitoring.

Subjek dalam penelitian ini didapatkan melalui *purposive sampling*, diantaranya adalah Bapak Sukanto selaku kepala bidang pelatihan dan pengembangan serta ketua tim kerja pelatihan kontrasepsi, Ibu Zaky selaku staf bidang pelatihan dan pengembangan serta anggota tim pelatihan kontrasepsi, Ibu Wiwiek selaku pemandu atau fasilitator dalam pelatihan kontrasepsi, Bidan Biby dan Bidan Elly selaku peserta pelatihan kontrasepsi serta Ibu Lilik selaku masyarakat yang terlibat dalam pelatihan kontrasepsi.

Sumber data pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yakni, sumber data primer

yang didapatkan secara langsung di lapangan dan data sekunder sebagai data pendukung peneliti. Teknik analisis data yang digunakan menurut Miles dan Huberman (1992) meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelatihan pelayanan kontrasepsi bagi bidan merupakan salah satu strategi penting yang diimplementasikan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi. Bidan memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kontrasepsi dan menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan di masyarakat.

Strategi program pelatihan pelayanan kontrasepsi, peneliti mengkaji dengan teori Widiastri (2019) yang menjelaskan bahwa terdapat beberapa tahapan dalam menganalisis sebuah program pelatihan yaitu proses perencanaan program, proses program pelatihan, evaluasi dan monitoring. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, indikatornya adalah sebagai berikut:

1. Proses Perencanaan Program

Keberhasilan suatu program dilakukan dengan perencanaan yang matang. Alder dalam Riyadi (2018) mendefinisikan perencanaan merupakan proses dalam menentukan kebutuhan dan tahapan-tahapan sebuah kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. Tahap pertama yang dilakukan dalam strategi BKKBN dalam pelayanan pelatihan kontrasepsi bagi bidan adalah perencanaan program.

BKKBN Provinsi Jawa Timur membuat perencanaan yang matang dalam menyelenggarakan pelatihan kontrasepsi. Perencanaan program merupakan sebuah perencanaan yang dilakukan sebelum kegiatan dilaksanakan. BKKBN membagi beberapa indikator dalam perencanaan pelatihan kontrasepsi, diantaranya persiapan pelatihan kontrasepsi, materi atau kurikulum, fasilitator, peserta, serta sarana dan prasarana. Berikut penjabaran dari indikator perencanaan pelatihan kontrasepsi:

a. Persiapan Pelatihan Pelayanan kontrasepsi

Persiapan yang matang dalam penyelenggaraan pelatihan kontrasepsi sangat penting untuk diperhatikan. Tujuannya agar pelaksanaan pelatihan berjalan dengan lancar. Namun, untuk mempersiapkan segala keperluan pelatihan BKKBN mengadakan rapat dengan berbagai pihak yang terlibat, diantaranya pegawai, pemandu pelatihan, pengawas pelatihan dan pihak yang membantu mempersiapkan pelatihan sehingga keputusan yang diambil dapat diterima semua pihak. Seperti yang

disampaikan oleh Ibu Zaky selaku Tim kerja pelatihan kontrasepsi.

“Dalam mempersiapkan segala kebutuhan pelatihan kontrasepsi yang paling penting rapat persiapannya mbak, karena dengan mengadakan rapat semua pihak yang terlibat dapat mengetahui keputusan yang akan diambil dan rapat persiapan pelatihan dilakukan berkali-kali mbak tidak cumin satu kali. Sehingga persiapan pelatihan ini benar-benar matang dan pelatihan siap untuk dilaksanakan.” (Wawancara pada tanggal 22 Mei 2024 pukul 14.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut Ibu Zaky mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan pelatihan kontrasepsi hal penting menyelenggarakan sebuah pelatihan yaitu dengan mengadakan rapat, karena rapat dapat menjadi jalan keluar dari banyaknya pertimbangan sehingga keputusan yang telah dibuat dapat diterima oleh segala pihak. Berikut dokumentasi rapat membahas persiapan pelatihan kontrasepsi oleh BKKBN Jawa Timur.



Gambar 1. Rapat Persiapan Pelatihan

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2023

Pada gambar 1 merupakan rapat persiapan yang diadakan oleh BKKBN dan membahas mengenai segala persiapan yang akan dilakukan pada pelatihan kontrasepsi. Pada wawancara tanggal 22 Mei 2024, Bapak Sukanto menuturkan bahwa dalam menyelenggarakan pelatihan kontrasepsi turut melibatkan beberapa pihak diantaranya, pegawai BKKBN, fasilitator atau pemandu pelatihan, pengawas pelatihan atau OPD KB (Organisasi Perangkat Daerah Keluarga Berencana) sebagai penjemputan pelatihan, pihak BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) sebagai kerjasama pengadaan alat kontrasepsi, dan pihak penyedia tempat praktik bidan dalam melakukan pelayanan yaitu PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) dan Rumah Sakit Mitra Keluarga. Rapat persiapan merupakan langkah pertama yang dilakukan BKKBN dalam merencanakan segala keperluan

pelatihan kontrasepsi. Hasil yang diperoleh melalui rapat persiapan membahas mengenai pembagian tugas dan tanggung jawab, lokasi penelitian, waktu penelitian, sumber daya manusia yang terlibat dan sarana prasarana pelatihan kontrasepsi.

Pelatihan pelayanan kontrasepsi bagi bidan yang diadakan oleh BKKBN terdapat dua (2) jenis pelatihan yaitu pelatihan daring diselenggarakan melalui platform *zoom* dan pelatihan luring dilaksanakan di dua (2) tempat diantaranya hotel sebagai tempat penginapan serta tempat praktik pelayanan kering menggunakan alat peraga dan di PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) dan Rumah Sakit Mitra sebagai tempat praktik pelayanan basah atau langsung dengan akseptor KB/masyarakat yang ber-KB. Berikut merupakan gambaran lokasi kegiatan pelatihan kontrasepsi.



Gambar 2. Lokasi Kegiatan Pelatihan Pelayanan Kontrasepsi

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2023



Gambar 3. Lokasi Praktek Lapangan Bidan

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2023

Kedua gambar diatas merupakan lokasi penelitian yang dilakukan secara luring. Gambar 2 merupakan lokasi penginapan peserta pelatihan tepatnya di hotel mercure Surabaya dan digunakan untuk pembelajaran didalam kelas serta praktik kering pelayanan. Sedangkan pada gambar 3 merupakan lokasi praktik bidan ketika melakukan praktik basah atau pelayanan secara langsung kepada akseptor (pasien) yang ingin ber-KB

Selain itu, BKKBN menyelenggarakan pelatihan setiap tahun dengan masing-masing angkatan sebanyak 4 angkatan di tiap bulan pada tahun tersebut dan 1 angkatan sebanyak 25 bidan/peserta pelatihan. Pelaksanaan pelatihan pelayanan kontrasepsi menghabiskan waktu selama empat belas (14) hari atau dua minggu dengan rincian hari pertama (1) merupakan rapat final beserta persiapan pelatihan kontrasepsi, enam (6) hari selanjutnya adalah pelaksanaan pelatihan kontrasepsi secara daring dan tujuh (7) hari terakhir merupakan pelaksanaan pelatihan kontrasepsi secara luring, dalam praktik luring terdapat dua praktek pelatihan yaitu praktik kering menggunakan alat peraga dan praktik basah secara langsung dengan masyarakat. Rentang waktu ini dilaksanakan berurutan mulai dari persiapan, pelatihan daring dan pelatihan luring.

b. Materi dan Kurikulum

Materi dan kurikulum pelatihan pelayanan kontrasepsi menjadi acuan dalam penyelenggaraannya, dalam materi yang akan disampaikan berpacu pada modul dan kurikulum yang telah disusun oleh Kementerian Kesehatan serta kerja sama dengan organisasi profesi (dokter dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI)), lintas program dan lintas sektor (BKKBN). Dengan adanya modul dan kurikulum diharapkan dapat memberikan pelatihan yang tersandar dan menghasilkan tenaga kesehatan yang berkualitas baik pengetahuan maupun keterampilan.

c. Pemandu atau Fasilitator

Serangkaian kegiatan pelatihan kontrasepsi tak terlepas dari peran fasilitator sebagai pemandu pelatihan. BKKBN dalam menentukan fasilitator meninjau dari beberapa kriteria dan berikut penjelasan dari Bapak Sukanto selaku Ketua tim kerja pelatihan pelayanan kontrasepsi.

“Yang menjadi fasilitator dalam pelatihan kontrasepsi adalah bidan yang sudah terlatih dalam ToT (*Training of Trainer*), ToT sendiri memang ditujukan kepada bidan yang direkomendasikan oleh dinas kesehatan untuk menjadi pemandu dalam pelatihan. Para fasilitator pelatihan kontrasepsi merupakan dokter spesialis kandungan dan bidan dari IBI (Ikatan Bidan Indonesia). Fasilitator memang diperuntukkan untuk meningkatkan keterampilan bidan dalam melayani kontrasepsi.” (Wawancara pada tanggal 22 Mei 2024 pukul 16.00 WIB)

Pelatihan ToT atau *Training of Trainer* merupakan pelatihan yang ditujukan kepada bidan

dosen untuk pengembangan profesinya. Maka dari itu, pelatihan ToT ini menjadi syarat bagi pemandu pelatihan kontrasepsi.

d. Peserta atau Bidan

Persiapan dalam pelatihan kontrasepsi salah satunya adalah sasaran program. Sasaran program pelatihan kontrasepsi yaitu ditujukan kepada bidan yang belum terlatih, berikut keterangan dari Bapak Sukamto mengenai peserta yang akan diikuti pelatihan kontrasepsi.

“Ada beberapa ketentuan yang menjadi syarat peserta pelatihan kontrasepsi. Pertama bidan pegawai PNS yang usianya tidak melebihi usia maksimal atau 40 tahun keatas. Kedua, bidan yang belum pernah mengikuti pelatihan kontrasepsi sama sekali. Dan peserta yang dipilih, langsung diserahkan kepada dinas kesehatan yang mana nantinya unit kerja bidan yang menunjuk siapa saja bidan yang akan diikuti ke pelatihan. Setelah itu dinas kesehatan menyerahkan data bidan yang diikuti pelatihan kepada BKKBN.” (Wawancara pada tanggal 22 Mei 2024 pukul 14.00 WIB)

Dengan pelatihan ini diharapkan para peserta bisa berperan sebagai tombak utama yang mampu memotivasi masyarakat terhadap penggunaan alat kontrasepsi melalui pelatihan pelayanan kontrasepsi.

e. Sarana dan Prasarana

Dalam menunjang keberhasilan pelatihan kontrasepsi diperlukan sarana dan prasarana yang memadai serta sesuai dengan kebutuhan pelatihan. Sebuah kegiatan yang melibatkan masyarakat dan dilengkapi dengan sarana prasarana dapat menjadi faktor pendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan (Sasmito dan Nawangsari, 2020). Pada pelatihan kontrasepsi yang diadakan oleh BKKBN Jawa Timur terdapat beberapa sarana dan prasarana yang dibutuhkan yaitu sarana prasarana saat pra pelatihan kontrasepsi, saat pelaksanaan pelatihan kontrasepsi dan pasca pelatihan kontrasepsi. Berikut gambar perencanaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan selama pelaksanaan pelatihan pelayanan kontrasepsi.



Gambar 4. Perencanaan Sarana dan Prasarana Pelatihan

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2023

Gambar 4 menjelaskan bahwa kebutuhan akan sarana dan prasarana pelatihan kontrasepsi merupakan aspek penting dalam persiapan pelatihan. Selain persiapan dalam perencanaan pelatihan pelayanan kontrasepsi yang diadakan oleh BKKBN Jawa Timur, peneliti melakukan observasi dan wawancara pada pihak akseptor KB atau masyarakat yang ikut merasakan dampak dari pelayanan kontrasepsi oleh bidan. Sebelum pelatihan pelayanan kontrasepsi bagi bidan dilaksanakan, peneliti melakukan wawancara dengan akseptor KB sebelum dilakukan pelayanan oleh bidan terkait pengetahuan dan informasi yang diketahui tentang pelatihan kontrasepsi. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Lilik selaku akseptor KB atau masyarakat,

“Saya kurang paham mengenai kontrasepsi mbak, yang saya tau hanya pil KB, suntik dan susuk. Saya memperoleh info terkait pelayanan ini melalui pihak KB di kelurahan dan kebetulan saya ingin ber KB. Begitu mbak. Ternyata disini memberikan pelayanan kontrasepsi jenis IUD dan Implan.” (Wawancara pada tanggal 3 Juni 2024 pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan wawancara tersebut, Ibu Lilik mengatakan bahwa beliau baru mengetahui jenis kontrasepsi IUD dan implan melalui pelatihan kontrasepsi ini. Selain itu, akseptor mengetahui info terkait pemberian pelayanan ini melalui pihak KB yang ada di kelurahan mereka tinggal. Hal ini menjelaskan bahwa BKKBN telah melakukan penyebaran informasi secara jelas dan merata sehingga masyarakat tertarik untuk melakukan pelayanan KB yang diselenggarakan oleh BKKBN.

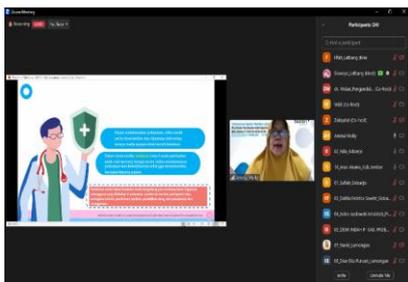
2. Proses Program Pelatihan

Proses program pelatihan diartikan sebagai waktu terlaksananya pelatihan. Menurut Masadeh (2012) pelatihan merupakan sebuah proses yang direncanakan untuk mengembangkan sikap, perilaku, keterampilan dan

pengetahuan melalui pengalaman selama belajar serta meningkatkan kinerja yang efektif. Dalam tahap ini, pelatihan pelayanan kontrasepsi terdiri dari dua (2) pelatihan yaitu pelatihan daring melalui platform *zoom meeting* dan pelatihan luring sebagai praktik bidan melakukan pelayanan. Pelatihan daring dilaksanakan selama 6 hari dan bidan akan diberikan *link zoom* serta mendapat paket pulsa sebesar 100.000,-. Pada pelatihan luring terdapat dua (2) praktik pelayanan yang dilakukan oleh bidan antara lain, praktik kering pelayanan kontrasepsi dan praktik basah atau praktik pelayanan secara langsung dengan masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Zaky selaku tim kerja penyelenggaraan pelatihan pelayanan kontrasepsi sebagai berikut:

“Pelatihan kontrasepsi ini dilaksanakan dengan dua jenis pelatihan mbak yaitu pelatihan daring selama 6 hari menggunakan platform *zoom meeting* dan pelatihan selama 7 hari yang dilaksanakan di lapangan dengan praktik pelayanan.” (Wawancara pada tanggal 22 Mei 2024 Pukul 14.00 WIB)

Selanjutnya, berikut merupakan dokumentasi pelatihan kontrasepsi yang diadakan secara daring dan luring dengan dipandu oleh para fasilitator.



Gambar 5. Pelaksanaan Pelatihan Kontrasepsi (daring)

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2023



Gambar 6. Pelaksanaan Pelatihan Kontrasepsi (luring) dan Praktek Kering

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2023

Pada kedua gambar diatas menggambarkan kondisi pelatihan pelayanan kontrasepsi. Gambar 5 merupakan pelaksanaan pelatihan kontrasepsi dengan menggunakan platform *zoom meeting* bersama fasilitator, sedangkan gambar 6 merupakan pelaksanaan pelatihan kontrasepsi secara luring atau tatap muka dan juga tempat pelaksanaan praktik kering peserta pelatihan. Praktik kering pada pelayanan kontrasepsi dilakukan dengan menggunakan alat peraga dan pemberian materi di kelas bersama fasilitator. Bidan secara bergiliran mencoba melakukan praktik kering tersebut sesuai arahan dan prosedur dari fasilitator dengan harapan saat praktik basah dengan pasien, bidan terampil dalam melakukan pelayanan dan sesuai prosedur yang telah diajarkan oleh fasilitator. Sedangkan, praktik basah merupakan praktik pelayanan secara langsung yang melibatkan masyarakat dan terdapat tiga (3) jenis pembagian dalam praktik pelayanan basah diantaranya, pra pelayanan, pelayanan dan pasca pelayanan kontrasepsi.

a. Pra Pelayanan Kontrasepsi

Bidan memberikan konseling kepada pasien atau masyarakat dengan menggunakan modul ABPK (Alat Bantu Pengambilan Keputusan ber KB) dan Roda Klop (Diagram Lingkaran dan Penerapan Kriteria Kelayakan Medis dalam Penggunaan Kontrasepsi). ABPK digunakan untuk membantu bidan dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kontrasepsi dan pembuat keputusan yang baik ketika ber KB. Roda Klop sebagai alat bantu dalam mengidentifikasi kesehatan, kondisi dan riwayat penyakit pasien sehingga dapat menentukan metode kontrasepsi yang akan digunakan dengan tepat dan aman. Hal ini dapat menjadi dasar terkait jenis kontrasepsi yang akan dipakai, kesehatan klien saat akan ber-KB dan pertimbangan lain mengenai pelayanan kontrasepsi.



Gambar 7. Pelaksanaan Pra Pelayanan oleh Bidan

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2023

Gambar 7 menjelaskan bidan dalam melakukan praktik pra pelayanan kepada akseptor (klien), dalam pra pelayanan bidan melakukan konseling dengan alat bantu dan roda klop yang dapat membantu bidan

sebelum pelayanan kontrasepsi di laksanakan. Hal ini dapat menjadi dasar terkait jenis kontrasepsi yang akan dipakai, kesehatan klien saat akan ber-KB dan pertimbangan lain mengenai pelayanan kontrasepsi.

b. Pelayanan Kontrasepsi

Proses paling penting dan diperhatikan dalam pelatihan kontrasepsi karena keterampilan, kemampuan, serta sikap bidan dapat diukur melalui pemberian pelayanan kontrasepsi. Pada pelayanan kontrasepsi bidan melakukan pemasangan atau pencabutan alat kontrasepsi dengan didampingi oleh fasilitator sehingga apabila terdapat kendala dalam pelayanan, dapat secara langsung diatasi oleh fasilitator dan pemberian pelayanan yang baik terhadap masyarakat berjalan dengan baik.



Gambar 8. Pelaksanaan Pelayanan Kontrasepsi oleh Bidan

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2023

Pada gambar tersebut dapat diketahui bahwa bidan telah melaksanakan praktik melakukan pelayanan kontrasepsi dengan didampingi oleh fasilitator atau pemandu pelatihan. Tujuannya apabila terdapat kendala secara langsung dapat teratasi oleh fasilitator, sehingga walaupun masih dalam praktik pelatihan harapannya pelayanan yang diberikan dapat diterima dengan baik oleh akseptor atau masyarakat yang akan ber KB.

c. Pasca Pelayanan Kontrasepsi

Bidan melakukan konseling kembali setelah melakukan pelayanan. Tujuan konseling pada pasca untuk mengetahui reaksi atau tanggapan terhadap pelayanan kontrasepsi, keluhan saat pelayanan, konsultasi tanggal pemeriksaan dan pemberian obat pasca pelayanan kontrasepsi. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami alat kontrasepsi yang telah digunakan dan dapat menjaga kesehatan secara baik dan sesuai arahan bidan. Pemahaman masyarakat terkait jenis kontrasepsi mempengaruhi tingkat penggunaan KB. Dengan adanya pelatihan pelayanan kontrasepsi ini masyarakat semakin paham akan pentingnya menggunakan KB terutama saat pelaksanaan konseling oleh bidan.

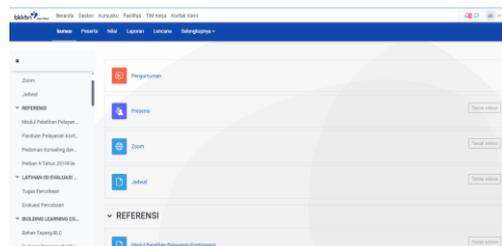


Gambar 9. Pelaksanaan Pasca Pelayanan oleh Bidan

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2023

Pada gambar diatas diketahui bidan dalam melakukan pasca pelayanan dengan akseptor atau masyarakat yang telah ber-KB. Dalam pasca pelayanan tersebut bidan melakukan konseling pasca pelayanan diantaranya, menanyakan terkait keluhan saat bidan melakukan pelayanan, memberikan saran dan masukan terkait alat kontrasepsi dan pemberian obat kepada akseptor.

Selain itu, serangkaian proses pelatihan pelayanan kontrasepsi memanfaatkan kecanggihan teknologi berupa platform pengajaran digital yaitu *website* LMS atau di BKKBN disebut dengan *e-latbang.bkkbnjatim*. Dalam *website* tersebut meringkas mengenai pelatihan pelayanan kontrasepsi seperti, jadwal kegiatan pelatihan, nama pemandu pelatihan, materi dan modul pelatihan yang disampaikan, absensi peserta selama pelatihan, evaluasi peserta setiap materi yang telah diikuti. Dengan *website* tersebut sangat membantu BKKBN, fasilitator terutama peserta selama mengikuti pelatihan. Dalam *website* LMS, terdapat beberapa fitur yang digunakan selama pelatihan kontrasepsi diantaranya, pengumuman atau informasi terkait pelatihan kontrasepsi, presensi pelatihan kontrasepsi, *zoom meeting* saat pelatihan daring, serta jadwal pelatihan kontrasepsi. Terdapat pula beberapa rangkuman atau ringkasan materi selama pelatihan kontrasepsi. Sehingga bidan dapat mempelajari kembali materi yang telah disampaikan oleh para fasilitator selama pelaksanaan pelatihan pelayanan kontrasepsi.



Gambar 10. Tampilan Website LMS Pelatihan Pelayanan Kontrasepsi

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2023

Pada gambar diatas dapat diketahui tampilan dari *website* LMS yang digunakan sebagai media pembelajaran pelatihan kontrasepsi, terlihat terdapat beberapa fitur dalam *website* tersebut, diantaranya, pengumuman atau informasi terkait pelatihan kontrasepsi, presensi pelatihan kontrasepsi, *zoom meeting* saat pelatihan daring, serta jadwal pelatihan kontrasepsi

3. Evaluasi

Tahap evaluasi pada penyelenggaraan pelatihan kontrasepsi dilakukan untuk mengetahui kendala-kendala yang ditemukan selama pelatihan kontrasepsi dan sebagai bahan perbaikan pelatihan kontrasepsi kedepannya. Pengertian evaluasi menurut Sulaiman (2018) merupakan proses dalam mengukur tercapainya suatu kegiatan dan memperoleh informasi mengenai manfaat dan harapan dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Evaluasi pelatihan adalah suatu proses kegiatan yang dapat diketahui apakah kegiatan tersebut berjalan dengan efektif sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditentukan.

Kendala pada saat pelatihan kontrasepsi dirasakan pada pegawai, fasilitator dan bidan pada saat pelatihan kontrasepsi. Kendala pada pegawai seperti disampaikan oleh Ibu Zaky selaku Tim kerja pelatihan kontrasepsi yang mengatakan bahwa,

“Kendala kami BKKBN saat pelatihan kontrasepsi itu jika ada bidan yang kurang terampil selama melakukan pelatihan dan memberikan pelayanan yang maksimal saat praktik langsung dengan klien. Jadi kami harus mempertimbangkan bidan atau peserta tersebut lulus atau tidak dalam pelatihan, alhasil kami BKKBN tetap meluluskan bidan tersebut lulusan bersyarat dan PR kami mbak tetap memantau perkembangan bidan tersebut pasca pelatihan harapannya agar memberikan pelayanan di unit kerjanya sesuai prosedur yang sudah disampaikan saat pelatihan.” (Wawancara pada tanggal 22 Mei 2024 pukul 14.00 WIB)

BKKBN melihat berbagai pertimbangan dengan kegigihan, keterampilan, dan keseriusan bidan saat menerima materi pelatihan. Dengan demikian, BKKBN membuat keputusan bidan tersebut mendapat predikat lulus bersyarat. Bersyarat yang dimaksud adalah BKKBN tetap memantau perkembangan bidan tersebut melalui lingkungan dan proses monitoring pasca pelatihan kontrasepsi. Namun, kendala pelayanan pada bidan turut dirasakan oleh akseptor KB / masyarakat yang ber KB. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Lilik bahwa.

“Bidan ketika melakukan pelayanan baik dan ramah mbak, saya dikonseling sampai saya paham dan tidak ragu dalam memilih jenis kontrasepsi. Tapi, ketika dilakukan pemasangan

kontrasepsi, bidan seperti kesulitan dan lama mbak. saya jadi takut kalau tidak berhasil mbak. setelah itu bidan memanggil dokter untuk membantu pemasangan, dan alhamdulillah berhasil mbak.” (Wawancara pada tanggal 4 Juni 2024 pukul 10.00 WIB)

Hasil wawancara dengan Ibu Lilik selaku akseptor KB atau masyarakat yang ber KB mengatakan bahwa pelayanan bidan saat praktik langsung dilapangan masih ragu dan belum optimal, hal ini terlihat dari sikap bidan yang kurang terampil dalam melakukan pelayanan. Oleh karena itu praktik lapangan pelayanan bidan ini sangat diawasi oleh para fasilitator dan dokter agar tidak terjadi kesalahan fatal dalam melakukan praktik pelayanan. Disamping itu, Ibu Wiwiek selaku fasilitator pelatihan memberikan tanggapan terkait sikap bidan saat pelatihan bahwa,

“Kemampuan dan pengetahuan bidan itu beda-beda, ada bidan yang sudah paham terkait pelayanan yang baik, cara pemasangan yang benar, ada juga bidan yang sama sekali tidak paham mengenai cara melayani kontrasepsi. Tapi itu semua tergantung niat dan kegigihan bidan saat mengikuti pelatihan, dan sejauh ini semua bidan mengikuti dan menyimak dengan baik pelatihan kontrasepsi ini. Hanya saja mungkin ketika melakukan praktik pelayanan secara langsung ada yang ragu, takut, dan sangat berani. Tapi alhamdulillah sejauh ini kendala-kendala yang saya temukan masih batas normal mbak. saran dan masukan untuk untuk bidan yaitu tetap melakukan pelayanan sesuai standar yang telah diberikan selama pelatihan dan bidan dapat memanfaatkan ilmu yang didapatkan dengan baik.” (Wawancara pada tanggal 3 Juni 2024 pukul 10.00 WIB)

Sikap pegawai selama pelatihan kontrasepsi tidak luput dari pandangan bidan, yaitu pegawai sangat mengayomi dan memfasilitasi kebutuhan bidan selama pelatihan berlangsung. Namun, pada *website* e-latbang.kb.jatim yang digunakan sebagai penunjang pelatihan kontrasepsi mengalami kendala dalam penggunaannya yaitu terdapat peserta yang belum menguasai akan kecanggihan teknologi, alhasil ditemukan peserta yang merasa kesulitan dalam mengakses fitur-fitur dari *website* LMS dan kebanyakan dari mereka adalah bidan yang berusia 40 lebih. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Biby selaku peserta pelatihan kontrasepsi.

“Pada *website* LMS (*Learning Management System*) yang digunakan selama pelatihan pelayanan kontrasepsi, menu yang terdapat di *website* tersebut terlalu banyak, sehingga para peserta yang sudah tua masih kesusahan saat

mengoperasikan *website*, melakukan absensi kegiatan dan upload tugas yang diberikan, saya merasa agak kesulitan mbak dalam mengisi evaluasi dan absensi dan terkadang lupa buat mengisi absen jadi ya maklum orang tua gak mau yang ribet ribet” (Sumber: Wawancara pada tanggal 3 Juni 2024 pukul 13.00 WIB).

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa fitur-fitur yang terdapat pada *website* LMS terlalu susah untuk orang tua yang tidak begitu mengikuti teknologi. Selain itu, dalam melakukan evaluasi pelatihan pelayanan kontrasepsi. Berikut gambar pelaksanaan rapat evaluasi pasca pelatihan kontrasepsi oleh BKKBN Jawa Timur.



Gambar 11. Rapat Evaluasi Pasca Pelatihan Kontrasepsi

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2023

Pada gambar 11 menjelaskan bahwa BKKBN Jawa Timur mengadakan rapat evaluasi pasca pelatihan kontrasepsi agar seluruh kendala, hambatan dan keputusan dapat diterima oleh seluruh pihak yang terlibat.

4. Monitoring

Tujuan penyelenggaraan pelatihan pelayanan kontrasepsi tidak tercapai jika proses monitoring tidak dilakukan. Monitoring menurut Harry Hikmat (2010) adalah proses mengumpulkan dan menganalisis informasi berdasarkan indikator yang ditetapkan secara berkelanjutan mengenai tindakan atau program yang akan datang. Monitoring merupakan pemantauan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh dan menganalisis informasi sebuah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai atau tidak Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur melakukan monitoring pasca diselenggarakannya pelatihan kontrasepsi. Monitoring pasca pelatihan sebagai bentuk tanggung jawab BKKBN Jawa Timur dalam penyelenggaraan pelatihan kontrasepsi sehingga tujuannya tercapai dan tersampaikan dengan baik oleh bidan. Selain itu, banyak masyarakat paham akan pentingnya penggunaan kontrasepsi. BKKBN melakukan proses monitoring secara langsung ke unit kerja bidan dan monitoring melalui *website* sistem

informasi dan evaluasi atau disebut dengan *website* monev (monitoring dan evaluasi).

Website monev dikembangkan sebagai *website* pemantauan monitoring pelatihan pada tahun 2023 oleh bidang pelatihan dan pengembangan BKKBN Jawa Timur. Tujuan *website* monev dalam monitoring pasca pelatihan kontrasepsi adalah untuk memudahkan bidan dalam menyampaikan hasil laporan pasca pelatihan dan memudahkan BKKBN dalam mengecek hasil laporan bidan melakukan pelayanan pasca pelatihan. Terdapat beberapa fitur dalam *website* monev, antara lain menu home, user, data, rekap, registrasi dan panduan penggunaan *website* monev. Berikut merupakan gambar tampilan *website* monev (monitoring dan evaluasi) yang digunakan bidan dalam melakukan pelaporan pasca mengikuti pelatihan pelayanan kontrasepsi.



Gambar 12. Tampilan Website Monev Pelatihan Pelayanan Kontrasepsi

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2024

Pada gambar tersebut terdapat menu home, user, data, rekap, registrasi dan panduan penggunaan *website* monev. Bidan dapat mengisi laporan kegiatan pasca pelatihan dengan membaca panduan pengisian yang berada di laman home *website* monev. Selanjutnya, bidan dapat mengikuti prosedur pengisian sesuai dengan panduan tersebut hingga data laporan benar-benar terupload.

Monitoring pada unit kerja bidan turut melibatkan fasilitator dalam memantau keterampilan bidan pasca pelatihan. Monitoring pelayanan yang dilakukan oleh fasilitator meliputi monitoring pra pelayanan, pelayanan dan pasca pelayanan kontrasepsi. Pra pelayanan kontrasepsi melihat cara bidan melakukan konseling terkait jenis kontrasepsi yang direkomendasikan untuk masyarakat, saat pelayanan memantau bidan dalam melakukan pemasangan atau pencabutan alat kontrasepsi dengan baik dan pasca pelayanan mengawasi konseling pada masyarakat hingga pemberian obat. Proses monitoring yang dilakukan oleh BKKBN Jawa Timur sangat memotivasi bidan ketika melakukan pelayanan sehingga bidan terus menerus belajar dan terampil dalam melakukan pelayanan di unit kerja. Seperti yang dikatakan oleh Mbak Elli selaku peserta pelatihan kontrasepsi.

“Monitoring yang dilakukan oleh BKKBN sangat memotivasi saya dan bidan lainnya setelah mengikuti pelatihan kontrasepsi ini. Karena dengan diadakannya monitoring saya terus menerus belajar dan meningkatkan keterampilan ketika melayani pasien.” (Wawancara pada tanggal 22 Mei 2024 pukul 11.00 WIB)

Proses monitoring pasca pelatihan memberikan dampak yang signifikan terhadap BKKBN Jawa Timur, fasilitator, bidan dan masyarakat. BKKBN dapat mengetahui kesuksesan dalam penyelenggaraan pelatihan kontrasepsi, dan untuk fasilitator dapat mengetahui manfaat yang dirasakan oleh bidan dan masyarakat setelah adanya pelatihan pelayanan kontrasepsi sehingga bidan menjadi semakin terampil dan masyarakat paham akan pentingnya penggunaan kontrasepsi. Selain itu, monitoring yang dilakukan BKKBN sangat memotivasi bidan dalam meningkatkan keterampilan pelayanan, mendapat pengetahuan dan ilmu baru yang sangat bermanfaat serta paham akan metode pengenalan kontrasepsi yang baik untuk masyarakat.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada pihak-pihak yang telah terlibat dalam penyusunan tugas akhir ini, antara lain:

1. Ibu Dra. Meirinawati, M. AP, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing saya dari awal hingga akhir
2. Ibu Eva Hany Fanida, S. AP., M. AP dan Bapak Trenda Aktiva Oktariyanda, S. AP., M. AP selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan dan saran selama penulisan skripsi saya
3. Bapak dan Ibu dosen Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya
4. Seluruh pihak yang terlibat selama penyusunan skripsi ini baik secara moril maupun materil.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai strategi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur dalam pelayanan pelatihan kontrasepsi bagi bidan maka dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pelatihan pelatihan kontrasepsi yang diadakan oleh BKKBN Jawa Timur dapat berjalan dengan baik dan efektif, namun masih terdapat kekurangan dalam penyelenggaraanya. Penelitian ini didasari oleh beberapa permasalahan kependudukan di Indonesia diantaranya, masih tingginya angka kematian ibu dan bayi, penurunan penggunaan kontrasepsi modern

terutama IUD dan Implan, masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kesehatan reproduksi dan kebutuhan ber KB yang belum terlayani dengan baik. Maka dari itu, BKKBN melalui Renstra (rencana strategis) tahun 2020-2024 menyelenggarakan pelayanan pelatihan kontrasepsi dan BKKBN provinsi Jawa Timur menjadi salah satu instansi pemerintah yang berkontribusi dalam program pelayanan publik berupa pelatihan kontrasepsi bagi bidan. Jika dikaitkan dengan teori menurut Widiastri (2019) yang memiliki empat (4) indikator antara lain:

Proses perencanaan program, pada indikator proses perencanaan program dapat diketahui bahwa dalam penyelenggaraan pelatihan kontrasepsi sudah sangat matang dan terencana dengan baik mulai dari persiapan pelatihan kontrasepsi, materi dan kurikulum, fasilitator atau pemandu pelatihan, peserta pelatihan, serta sarana dan prasarana pelatihan. Persiapan dalam pelatihan kontrasepsi, BKKBN Jawa Timur mengadakan rapat persiapan dengan beberapa pihak antara lain, pegawai BKKBN Jawa Timur, fasilitator atau pemandu pelatihan, pengawas pelatihan atau OPD KB (Organisasi Perangkat Daerah Keluarga Berencana), pihak BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) dan pihak penyedia tempat praktik bidan untuk merumuskan jalannya pelatihan. Selanjutnya materi dan kurikulum pelatihan berpacu pada modul dan kurikulum yang disusun oleh Kementerian Kesehatan sehingga materi yang diberikan sesuai dengan standar pemerintah. Fasilitator atau pemandu pelatihan yang dipilih merupakan fasilitator yang telah mengikuti pelatihan ToT (*Training of Trainer*) yaitu dokter spesialis dan bidan dosen. Lalu peserta dan bidan sebagai sasaran dari pelatihan kontrasepsi serta bidan yang diikutkan dalam pelatihan merupakan bidan berstatus PNS dan yang belum mengikuti pelatihan. Terakhir sarana dan prasarana yang dipersiapkan sudah sesuai dengan standar dan seluruhnya menjadi penunjang dalam keberhasilan pelatihan kontrasepsi

Proses program pelatihan, pada indikator proses perencanaan program dapat diketahui bahwa pelatihan pelayanan kontrasepsi ini terdiri dari dua (2) pelatihan yaitu pelatihan daring dan pelatihan luring. Praktik daring dilaksanakan melalui *zoom meeting* sedangkan pelatihan luring dilaksanakan dengan dua (2) praktik pelayanan yaitu praktik kering menggunakan alat peraga kontrasepsi dan praktik basah yang dilakukan dengan tiga (3) jenis pelayanan diantaranya, pra pelayanan kontrasepsi, pelayanan kontrasepsi dan pasca pelayanan kontrasepsi. Pra pelayanan kontrasepsi, bidan memberikan konseling kepada pasien atau masyarakat dengan menggunakan modul ABPK dan Roda Klop. Selain itu, BKKBN Jawa Timur menggunakan *website* LMS atau *e-latbang.bkkbnjatim*. Dalam *website* tersebut meringkas mengenai pelatihan pelayanan kontrasepsi mulai dari

jadwal pelatihan, presensi pelatihan hingga rangkuman atau ringkasan materi selama pelatihan kontrasepsi.

Evaluasi, pada indikator evaluasi dapat diketahui bahwa kendala yang ditemukan selama pelatihan pelayanan kontrasepsi dirasakan oleh pegawai, fasilitator dan bidan. Terdapat peserta atau bidan yang kurang terampil saat praktik pelayanan dengan masyarakat, hal ini mengakibatkan pegawai memberikan status kelulusan bidan dengan lulus bersyarat karena ditakutkan berpengaruh terhadap pelayanan yang diberikan kedepannya. Disamping itu, pegawai BKKBN telah melakukan pelayanan dengan ramah kepada bidan dan sikap fasilitator selama memandu jalannya kegiatan sangat sabar dan menarik sehingga peserta tidak bosan juga dapat memahami materi yang disampaikan dengan baik. Selain itu, evaluasi penunjang pelatihan berupa *website* e-latbang.bkkbnjatim menjadi sorotan dalam penggunaannya, bidan yang berusia 40 tahun merasa kesusahan dengan fitur-fitur yang terdapat di *website* e-latbang dan tidak adanya pemberitahuan berupa notifikasi setelah melakukan pembaharuan data pada *website* e-latbang. Selain itu, saat praktik pelayanan kontrasepsi bidan merasa ragu atas kemampuannya dalam melayani pasien dan mengakibatkan pelayanan yang kurang baik dan tidak sesuai standar.

Monitoring, pada indikator monitoring dapat diketahui bahwa BKKBN Jawa Timur telah melaksanakan monitoring pasca pelatihan pelayanan kontrasepsi dengan kunjungan ke unit kerja bidan dan melalui *website* monev (monitoring dan evaluasi). untuk memantau keterampilan bidan setelah mengikuti pelatihan. Proses monitoring pasca pelatihan memberikan dampak yang signifikan terhadap BKKBN Jawa Timur, fasilitator, bidan dan masyarakat. BKKBN dapat mengetahui kesuksesan dalam penyelenggaraan pelatihan kontrasepsi, dan untuk fasilitator dapat mengetahui manfaat yang dirasakan oleh bidan dan masyarakat setelah adanya pelatihan pelayanan kontrasepsi sehingga bidan menjadi semakin terampil. Selain itu, monitoring yang dilakukan BKKBN sangat memotivasi bidan dalam meningkatkan keterampilan pelayanan, mendapat pengetahuan dan ilmu baru yang sangat bermanfaat serta bagi masyarakat menjadi semakin paham akan jenis-jenis kontrasepsi dan informasi mengenai KB dapat diperoleh dengan jelas juga akurat.

Saran

Berdasarkan hasil dan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, maka terdapat beberapa saran dari peneliti yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan masukan dan evaluasi. Saran tersebut antara lain:

1. Diharapkan BKKBN Provinsi Jawa Timur selama pelayanan pelatihan kontrasepsi membuat lembar penilaian terhadap peserta dan

menginformasikannya kepada peserta sehingga seluruh peserta mengikuti pelatihan kontrasepsi dengan sungguh-sungguh dan fokus.

2. Diharapkan BKKBN Provinsi Jawa Timur membuat tutorial cara menggunakan *website* e-latbang.bkkbn.jatim dengan video dan bahasa yang mudah untuk dipahami serta *link* tutorial dalam penggunaan *website* dilampirkan pada halaman sebelum login sehingga peserta atau bidan dengan mudah melihat dan memahami penggunaan *website* e-latbang.bkkbn.jatim.
3. Diharapkan BKKBN Provinsi Jawa Timur mengembangkan *website* e-learning.bkkbn.jatim menjadi aplikasi di *appstore*, sehingga peserta dengan mudah mengakses segala informasi mengenai pelatihan kontrasepsi tanpa melalui pencarian *browser*.
4. Diharapkan BKKBN Provinsi Jawa Timur menambahkan fitur pemberitahuan berupa notifikasi terkait pembaharuan data peserta, sehingga memaksimalkan peserta dalam *update* data atau presensi pelatihan.
5. Diharapkan BKKBN Provinsi Jawa Timur melakukan penyebaran informasi secara gencar terkait pentingnya penggunaan kontrasepsi dan pengetahuan mengenai keluarga berencana melalui berbagai platform sosial media seperti tiktok, instagram, facebook, youtube dll.
6. Diharapkan BKKBN Provinsi Jawa Timur mengembangkan *website* monev menjadi aplikasi di *appstore*, sehingga bidan ketika mengisi laporan monitoring dan evaluasi pasca pelatihan lebih cepat dan praktis

DAFTAR PUSTAKA

- Adhima, N. F, & Oktariyanda, T.A. 2023. Manajemen Strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Jawa Timur. Publika. Volume 11 Nomor 4, Tahun 2023, 2365-2378. (online).
- Aliah, N. 2016. Strategi Peningkatan Pelayanan Melalui *Website* Pada UPT-P2T BKPM Provinsi Sulawesi Selatan.
- Asi, dkk. 2023. Pelayanan Keluarga Berencana. Buku Kesehatan. Penerbit Cv.Eureka Media Aksara. ISBN: 978-623-151-446-2.
- Badan Pusat Statistik. 2021. Data Angka Kematian Bayi Berdasarkan Sensus Tahun 1971-2020 dan Jumlah Kematian Ibu di Indonesia Menurut Provinsi. Databoks.
- Badan Pusat Statistika. 2022. Jumlah Tenaga Kesehatan di Indonesia. Data Indonesia.

- Berita Negara Republik Indonesia. 2021. [www.Djpp.Depkumham.Go.Id](http://www.djpp.depkumham.go.id).
- BKKBN Jatim Latih 100 Bidan Pelayanan KB Implan dan IUD. 2023. Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur.
- Devi, Nindya A.M., & Meirinawati. 2022. Manajemen Strategi Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmptsp) Kabupaten Trenggalek. *Jurnal Administrasi Publik*. Penerbit: Publika. Vol., 11. No. 1, 1593-1604 (online).
- Hati, F. S. 2023. Evaluasi Skor Pre-Test dan Post-Test Peserta Pelatihan Pelayanan Kontrasepsi bagi Dokter dan Bidan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan di BKKBN Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Edutrained: Jurnal Pendidikan Dan Pelatihan*, 7(1), 67–78. <https://doi.org/10.37730/edutraind.v7i1.220>.
- Hikmat, H. 2010. *Monitoring dan Evaluasi Proyek*. Humaniora, Bandung.
- Krass, P. 2023. *Pediatric Resident Perspectives on Long-Acting Reversible Contraception Training: A Cross-Sectional Survey of Accreditation Council for Graduate Medical Education Trainees*. *Journal of Adolescent Health*, 72(6), 964–971. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2023.01.016>.
- Masadeh, M. 2012. *Training, Education, Development And Learning: What Is The Difference*. *European Scientific Journal* May edition. <https://www.researchgate.net/publication/279480522>
- Mudiono, Suwardi, & Sardjono, H. S. 2023. Strategi Peningkatan Kualitas dan Kinerja Penyelenggara Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun. *Jurnal Administrasi Negara*, 12. No. 2.
- Pratiwi, dkk 2021. Pelatihan Peningkatan Keterampilan Bidan dalam Pemasangan KB IUD dengan menggunakan Teknologi *Virtual Reality*. Juli 2021, 5, 236. <https://doi.org/10.24903/sj.v5i2.1518>.
- RENSTRA BKKBN 2020-2024. Rencana Strategis BKKBN Tahun 2020-2024. https://e-ppid.bkkbn.go.id/assets/uploads/files/0981c-restra_sestama_2020-2024.pdf
- Riyadi, F. 2016. Urgensi Manajemen Islam dalam Bisnis Islam. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3 (1), 65-84, 2016. 55, 2016.
- Sasmito, C., & Nawangsari, E.R. 2020. Pelaksanaan Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera di Wilayah Kota Batu. *Journal of Public Sector Innovations*, Vol.4, No. 2, Mei Tahun 2020, (55 – 58).
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Online).
- Sulaiman, A. 2018. Evaluasi Aplikasi Gojek. <https://e-journal.uajy.ac.id/15500/3/TS150702.pdf>.
- Sundoro, T., Tsaqila, N., & Nuha, F. U. 2023. Peningkatan Pemahaman tentang Pentingnya Program Keluarga Berencana di Dusun Mojosari Kelurahan Wonolelo Kecamatan Pleret Bantul. *Jurnal Abdimas Kesehatan (JAK)*, 5(1), 133. <https://doi.org/10.36565/jak.v5i1.477>.
- Tophan, M. A. 2021. Strategi Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Masa Pandemi Covid 19 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makasar. Universitas Hasanuddin Makasar.
- UNFPA. 2020. Strategi Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Berbasis Hak untuk Percepatan Akses terhadap Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi yang Terintegrasi dalam Mencapai Tujuan Pembangunan Indonesia. <https://indonesia.unfpa.org/>.
- UU Nomor 52 Tahun 2009. *Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga*. (Online).
- UU_36_2009_Kesehatan. https://infeksiemerging.kemkes.go.id/download/UU_36_2009_Kesehatan.
- Widiastri, Ayu D. 2019. Program Pelatihan Sebagai Upaya Pemberdayaan Korban Pasca Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba Di Rumah Damping Borneo Bnn Ri Samarinda (Vol. 1, Issue 1).

